



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WINARSIH
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 832763

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 455.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/85 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 66.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF 80/ST WAGON Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOTOR, SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA CB15AIRRF M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
5. MOTOR, HONDA Y1SO2NO2LO A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.504.100

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 531.204.100

III. HUTANG Rp. 166.528.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 364.675.500



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.